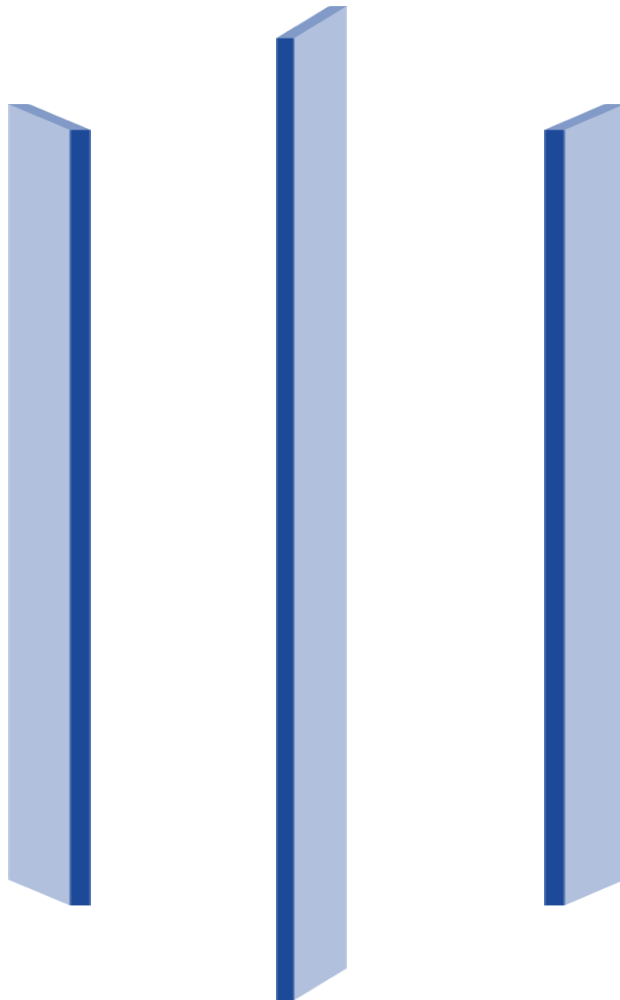




LAPORAN CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Triwulan I Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Triwulanan untuk sebagai perwujudan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Bertujuan untuk menilai progress pencapaian target kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) yang telah ditetapkan di awal tahun 2024. Laporan ini juga merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung (intemediate evaluation) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dapat memenuhi target sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh masing masing Perangkat Daerah.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi komrehensif mengenai progress pencapaian target dalam mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan melalui indikator kinerja yang terukur. Informasi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, sehingga upaya pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Kritik, masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan.

Sungai Pinang, Mei 2024

Camat Sungai Pinang



MARWATA, SE

NIP. 19690217 198903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum.....	1
.....	2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	3
2.1 Perjanjian Kinerja.....	3
BAB III. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN.....	3
3.1 Realisasi kinerja sasaran strategis.....	3
3.2 Realisasi kinerja kegiatan.....	4
3.3 Realisasi kinerja subkegiatan.....	8
BAB IV. REALISASI ANGGARAN.....	28
BAB V. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT.....	32
LAMPIRAN	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Perangkat Daerah pada lingkungan Kecamatan Sungai Pinang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.
2. Memberi gambaran tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
KECAMATAN SUNGAI PINANG

II. PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Camat Banjar Tahun 2024, yang menjadi tanggung jawab bagian Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	Nilai	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Indek	74,00	1.983.661.150	Camat
					Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	100%	10.230.000	Camat
					Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	100%	56.317.00	Camat

					Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase	100%	20.233.000	Camat
					Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	100%	157.283.500	Camat
					Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase	100%	9.676.000	Camat
2.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja Intern (IKKI) Kec.Sungai Pinang	76	Indeks	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja Intern (IKKI) Kec.Sungai Pinang	Indeks	76	2.271.964.048	Sekcam
3.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persentase	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase	100	4.039.60	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset

4.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	1.843.220.92	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
5.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persentase	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase	100	9.648.800	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
6.	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi	100	Persentase	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi	Persentase	100	10.770.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	103.175.800	Kasubag Umum dan Kepegawaian

8	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100	Persentase	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase	100	11.070.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	201.028.920	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persentase	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase	100	89.010.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11.	Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitas Kewenangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	100	3.503.400	Kasi Kessos

12.	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi kegiatan Kessos yang dilaksanakan	100	Persentase	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase koordinasi kegiatan Kessos yang dilaksanakan	Persentase	100	23.201.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
13.	Tercapainya Persentase Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dikecamatan	100	Persentase	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dikecamatan	Persentase	100	44.723.500	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
14.	Tercapainya Fasilitasi Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100	Persentase	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase	100	38.603.500	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
15.	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturaKepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persentase	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase	100	4.773.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase penyelenggaraan	100	Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan	Persentase	100	151.339.500	Kepala Seksi Pemerintahan

	Urusan Pemerintahan Umum	urusan pemerintahan umum			Sesuai Penugasan Kepala Daerah	urusan pemerintahan umum				
15.	Tercapainya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persentase	Fasilitasi Rekomendasi,Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase	100	11.397.700	Kepala Seksi Pemerintahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

• 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang memiliki 6 sasaran strategis dengan 7 indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan kinerja tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Periode 2022-2026. Hal ini karena capaian atas target masing-masing IKU hampir seluruhnya dicapai pada triwulann IV (akhir tahun 2023), terdapat beberapa IKU yang nilainya dapat dilihat per triwulan. Adapaun capaian kinerja utama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan I Tahun 2024 yang diuraikan berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten)	77	Nilai	0	0
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = Σ (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	76	Persen	0	0
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang telah disusun dibagi Jumlah Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi yang harus disusun dikali 100%	100	Persen	23.53%	23.53%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, perangkat daerah yang tersusun	14	Dokumen	3	21.43%
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	20	Laporan	5	25.00%
	Pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	22.1%	22.1%
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	168	Orang/ bulan	27	16.07%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	3	25.00%
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	100 %
	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	100	persen	0.00%	0.00%
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	0.00%
	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Administrasi Kepegawaian yang direncanakan x 100%	100	persen	0.00%	0.00%
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	1	Orang	0	0.00%
	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Umum kantor yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan umum yang direncanakan x 100%	100	persen	25.00%	12.50%
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	0.00%
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	0	0.00%
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	25.00%
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	4	Paket	1	25.00%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu difasilitasi	178	Orang	0	0.00%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti/diselenggarakan	12	Laporan	3	25.00%
	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi yang dilaksanakan dibagi dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi dikali 100%	100	persen	20.00%	6.67%
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	1	6.67%
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi yang disediakan dibagi Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi yang direncanakan x 100%	100	persen	24.32%	24.32%
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disediakan	12	Laporan	3	25.00%
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	25.00%
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	3	23.08%
	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi yang dipelihara dibagi jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi yang direncanakan x 100%	100	persen	30.77%	23.08%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	unit	2	22.22%
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	unit	2	33.33%
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	0.00%
II.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan yang direncanakan dikali 100%	100	persen	33.33%	6.67%
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan yang diselenggarakan dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	persen	66.67%	0.00%
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Dilaksanakan	3	Laporan	0	0.00%
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yng dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yng dilimpahkan yang diselenggarakan dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	25.00%	8.33%
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang Dilaksanakan	12	Laporan	1	8.33%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
III	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dibagi jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan x 100%	100	persen	26,5%	26,5%
	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan dibagi jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan dikali 100%	100	Persen	44.44%	44.44%
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang Dilaksanakan	2	Lembaga Kemasyaraka tan	2	100%
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	7	Laporan	2	28.57%
IV	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi trantibum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi yang direncanakan x 100%	100	persen	16.67%	16.67%
	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	jumlah penyelenggaraan trantibum yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	persen	16.67%	16.67%
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	4	Laporan	1	25.00%
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang Dilaksanakan	2	Laporan	0	0%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
V	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan dibagi Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	100	Persen	25.00%	25.00%
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penugasan yang dilaksanakan dibagi: Jumlah Upenugasan yang direncanakan x 100%	100	Persen	25.00%	25.00%
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Orang	0	0.00%
	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang Dilaksanakan	3	Dokumen	1	33.33%
VI	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan x 100%	100	persen	25%	25%
	Terselenggranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana dibagi Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	Persen	16.67%	16.67%

			Pemerintahan Desa yang direncanakan X 100%				
	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	1	Dokumen	0	0.00%
	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Dilaksanakan	11	Laporan	2	18.18%
Capaian Kinerja (%)							17.76%

Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinangadalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dengan Indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Kinerja Indikator EKK Triwulan I Tahun 2024 belum ada capaian karena penilaian Indikator EKK dilaksanakan oleh Tim penilai Kabupaten yaitu dari Bagian Organisasi. Walaupun penilaian EKK 2024 belum dilaksanakan.

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 sebesar Rp. 2.549.505.648,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.538.435.648,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.070.000,- Secara grafis, struktur anggaran Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.7 Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
1	2	3	4	5
	Kecamatan Sungai Pinang	2.549.505.648	838.367.554	32.88%
1.	Belanja Operasi	2.538.435.648	838.367.554	32.88%
2.	Belanja Modal	11.070.000	0	0%

Berdasarkan tabel diatas, serapan anggaran Kecamatan Sungai Pinang tercapai 32.88% yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.549.505.648,- terealisasi sebesar Rp. 838.367.554,-. Berdasarkan jenis belanja, Belanja Operasi tercapai 32.88% dari pagu anggaran Belanja Operasi sedang belanja modal serapan anggaran mencapai 0% dari pagu belanja modal. Gambaran capaian secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	0	0	2.494.268.273	389.760.264	15.62%
I	Terselenggaranya urusan penyusunan program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cinta Puri darussalam	76	0	0	2.236.027.473	353.647.764	15.81%
1)	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	23.53%	23.53%	5.600.000	0	0.00%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3 Dokumen	21.43%	3.500.00	0	0.00%
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	5 Laporan	25.00%	2.100.000	0	0.00%
2)	Pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	22.10%	22.10%	1.786.110.918	254.575.288	14.25%
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/ Bulan	27 Orang/ Bulan	16.07%	1.754.520.918	246.865.288	14.07%
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	25.00%	30.840.000	7.710.000	25.00%
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	750.000	0	0
3)	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0.00%	0.00%	9.734.000	2.250.000	23.11%
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0.00%	9.734.000	2.250.000	23.11%
4)	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	0.00%	0.00%	10.000.000	0	0.00%
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang	0.00%	10.000.000	0	0.00%
5)	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	100%	12.50%	12.50%	111.579.400	30.848.941	27.64%
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	0 Paket	0.00%	2.080.000	0	0.00%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	0 Paket	0.00%	3.119.000	0	0.00%
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4 Paket	1 Paket	25.00%	5.824.000	444.500	7.63%
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	1 Paket	25.00%	4.326.400	150.000	3.46%
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan	0.00%	6.230.000	0	0.00%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	25.00%	90.000.000	30.254.441	33.61%
6)	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	100%	6.67%	6.67%	38.480.000	19.000.000	49.37%
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1 Unit	6.67%	38.480.000	19.000.000	49.37%
7)	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	100%	24.32%	24.32%	170.339.155	33.774.750	19.82%
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	25.00%	1.650.000	0	0.00%
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3 Laporan	25.00%	12.479.155	1.824.750	14.62%
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3 Laporan	23.08%	156.210.000	31.950.000	20.45%
8)	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi	100%	23.08%	23.08%	104.184.000	13.198.785	12.66%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	2 Unit	22.22%	68.580.000	10.498.785	15.30%
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	2 Unit	33.33%	5.560.000	2.700.000	48.56%
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0.00%	30.044.000	0	0.00%
II	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan,	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	100%	6.67%	6.67%	60.999.000	2.600.000	4.26%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan	Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana						
1)	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	0.00%	0.00%	30.000.000	0	0.00%
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	0 Laporan	0.00%	30.000.000	0	0.00%
2)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yng dilimpahkan	100%	8.33%	8.33%	30.999.000	2.600.000	8.38%
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1 laporan	8.33%	30.999.000	2.600.000	8.38%
III	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100%	26.50%	26.50%	52.108.000	10.412.500	19.98%
1)	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	44.44%	44.44%	52.108.000	10.412.500	19.98%
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 lembaga Kemasyarakatan	2 lembaga Kemasyara katan	100%	9.108.000	8.262.500	90.71%
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	2 Laporan	28.57%	43.000.000	2.150.000	5.00%
IV	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100%	16.67%	16.67%	29.000.000	10.150.000	35.00%
1)	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	16.67%	16.67%	29.000.000	10.150.000	35.00%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1 Laporan	25.00%	28.000.000	10.150.000	36.25%
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	0 Laporan	0.00%	1.000.000	0	0.00%
V	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25.00%	25.00%	91.634.000	9.450.000	10.31%
1)	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	25.00%	25.00%	91.634.000	9.450.000	10.31%
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	0 Orang	0.00%	18.594.000	0	0.00%
	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	1	33.33%	73.040.000	9,450,000	12.93%
VI	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100%	16.67%	16.67%	24,499,800	3,500,000	14.28%
1)	Terselenggranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	16.67%	16.67%	24,499,800	3,500,000	14.28%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	2,500,000	0	0.00%
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Laporan	2 Laporan	18.18%	21,999,800	3,500,000	15.90%
TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA								
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG								
BELANJA TIDAK LANGSUNG								

k